IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

di Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung

SKRIPSI

Disusun oleh :

TEGUH MULYA

17520079

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Pembangunan Sosial Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:

Hari	:	Jumat, 4 Februari 2022
Jam	:	13.30 wib
Tempat	:	Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
Ir. Nelly Tiurmida, M.PA Ketua Penguji/Pembimbing	.....
Rr. Leslie Retno Angeningsih, Ph.D Penguji Samping I	.....
Utami Sulistiana, S.P.,M.P Penguji Samping II	.....

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Gimo Tri Tjahjoko, M.A.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	:	Teguh Mulya
NIM	:	17520079
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima *(di Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung)*" adalah benar-benar merupakan karya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk adalah saya nyatakan dengan benar.

Yogyakarta, 7 Febuari 2022
Menyatakan

METERAI TEMPEL

Teguh Mulya
NIM 17520079

iii

MOTTO

"Barangsiapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga"
(HR. Musilm)

"Disiplin Adalah Jembatan antara Cita-Cita dan Pencapaiannya"
(John Rohn)

"Follow your passion. It will lead you to your purpose"

(*Oprah Winfrey)*

"Hidup dengan cinta dan kasih adalah warna yang sangat indah"

(Teguh Mulya)

"Memulai dengan Penuh Keyakinan, Menjalankan dengan Penuh Keikhlasan, Menyelesaikan dengan Penuh Kebahagiaan"
(Fadillah Ekasaputri)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatNya. Akhirnya saya dapat menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan target. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu menyemangati dan memberikan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan pendidikan saya.

1. Untuk kedua orang tua saya, Bapak Taufik Hasyim dan Ibu Mulyana yang selalu menjadi sumber kekuatan saya, yang selalu memberikan cinta, kasih dan motivasi serta selalu mendukung keputusan-keputusan saya. Terimakasih atas do'a-do'a kalian dan kerja keras kalian untuk menyekolahkan saya, tanpa kalian saya mungkin tidak akan berada di tahap ini.
2. Untuk Saudaraku, Taufan Mulyono dan Duta Perkasa. Terimakasih atas perhatianmu selama ini, terimakasih sudah menjaga Bapak dan Ibu disaat saya jauh dari kalian.
3. Untuk keluarga besarku, mak cik, pakcik, busu, pakde, bukde, serta persepupuan, terimakasih telah mensupport saya.
4. Untuk Dosen Pembimbingku Ibu Ir. Nelly Tiurmida, MPA yang selalu sabar membimbing saya dan mengajak bimbingan dari awal hingga akhir serta telah memberikan ilmunya kepada saya hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Untuk Dosen pengujiku Ibu Rr. Leslie Retno Angeningsih, Ph.D dan Ibu Utami Sulistiana, S.P,M.P yang telah menguji skripsi saya untuk dapat membenahi skripsi ini agar menjadi tulisan yang lebih baik lagi.

6. Terimakasih kepada teman-temanku (Krismon Aji, Asep Syamsul, Beserta Teman lainnya) yang telah menemani selama perkuliahan ini, yang saling membantu dan saling memberikan semangat dalam keadaan suka maupun duka, semoga tuhan membalas segala kebaikan kalian, menjadi orang sukses nantinya dan semoga pertemanan kita selamanya.
7. Terimakasih Kepada Fadillah Eka Saputri,S.Sos, M.IP yang telah menemani, mensupport dan membantu saya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada teman-teman dikampung halamanku (Trisno, Fahrul, Pentol dan teman lainnya) yang selalu memberikan semangat kepadaku, yang selalu menyakan kabarku, serta selalu membantuku dikala susah maupun senang, semoga Allah selalu membalas kebaikan kalian dan semoga pertemanan ini selamanya.
9. Terimakasih Kepada teman-teman seperjuanganku angkatan 2017 yang telah memberikan pengalaman selama perkuliahan, terimakasih juga untuk anak-anak angkatan IP 2017, terimakasih selalu menjadi tim yang kompak, saling membantu satu sama lain.
10. Terimakasih kepada Asrama Mahasiswa Belitung Timur “Betiong” Yogyakarat sebagai tempat naungan dan keluarga Belitong
11. Terimakasih kepada almamaterku STPMD “APMD” Yogyakarta yang sudah memberikan saya kesempatan untuk belajar di STPMD “APMD” Yogyakarta hingga saya dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan saya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, kemudian shalawat serta salamNya, mudah-mudahan terlimpah curah kepangkuan Rasulullah SAW, beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang masih turut dengan ajarannya. Aamiin. Berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapatmenyelesaikan tugas penulisan skripsi yang berjudul: **"Implementasi Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (*Di Kecamatan Manggar, kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung*)".**

Penulis benar-benar menyadari sepenuhnya dalam menulis skripsi ini masih banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan dan perlu dipelajari lebih dalam lagi, usaha tersebut sudah penulis lakukan, namun karena terbatas kemampuan penulis menyebabkan skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan yang bersifat membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Kelancaran proses penyusunan skripsi ini berkat bimbingan, arahan, dan petunjuk serta kerja sama dari berbagai pihak, baik pada tahap persiapan, penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini. Penyusun dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang memberikan kekuatan, rahmat dan karunianya sehingga sampai pada tahap ini.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"Yogyakarta.
3. Dr. Guno Tri Tjahjoko,M.A selaku ketua prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogykarta.
4. Ibu Utami Sulistiana, S.P.,M.P selaku pembimbing akademik yang telah membantu dalam proses kuliah.

5. Ibu Ir. Nelly Tiurmida, MPA selaku dosen pembimbing skripsi banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun dalam penulisan skripsi.
6. Rr. Leslie Retno Angeningsih,Ph.D Penguji samping I skripsi, yang telah memberikan masukkan yang sangat berguna untuk memperbaiki penyusunan skripsi ini.
7. Utami Sulistiana, S.P.,M.P selaku Dosen Penguji samping II skripsi, yang telah memberikan masukkan yang sangat berguna untuk memperbaiki penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD"APMD" Yogyakarta yang telah memberikan ilmu selama dibangku perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang selama ini tidak mengenal pamrih dalam membimbing dan menuangkan ilmu pengetahuan kepada penyusun selama duduk di bangku perkuliahan.
10. Seluruh Staf Pegawai Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, atas segala pelayanan yang telah diberikan selama ini guna menunjang kegiatan perkuliahan yang kami butuhkan selama ini.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna karna keterbatasan kemampuan penulis dalam menyajikan tulisan ilmiah yang baik. Besar harapan penulis kepada pebaca berupa masukan dan kritikan yang membangun guna perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, 7 Febuari 2022

Teguh Mulya

INTISARI

Penelitian ini meneliti bagaimana implementasi Perbup No.61 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan PKL dan meneliti faktor-faktor yang berperan dalam implemantasi tersebut. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pemerintah daerah dalam implementasi Perbup No.61 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pembinaan PKL.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif kualitatif , dengan objek kajian Komunikasi, Sumber-sumber, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini mengambil 16 orang informan yang terdiri dari pihak Kecamatan, Dinas DPMPTSPP, UPT Pasar dan Satuan Polisi Pamong Praja. dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, mendalam dan dokumentasi. penelitian ini menggunakan teknik analisis data yakni, penyusunan data, klasifikasi data, pengelolaan data, penyimpulan data dan triangulasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijkan implementasi penataan dan pembinaan PKL di Kecamatan Manggar dikatakan *implementation gap* yakni dimana suatu implementasi kebijakan tidak selalu berhasil, adakalanya tujuan tidak tercapai. Suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai hal ini bisa dilihat dari faktor- faktor yang berperan dalam implemeentasi tersebut yaitu, komunikasi yang dilakukan implementor sudah maksimal tetapi dari PKL kurang merespon insruksi dari implementor, Sumber daya manusia yang dimiliki instansi baik mulai dari tingat pendidikan, pengalaman, kemampuan dan pemahaman implementor dalam melaksankan kebijakan. Sumber daya anggaran sudah mencukupi dalam melaksanakan program kebijakan mulai dari dana APBN,APBD dan retribusi pasar. Disposisi, kecenderungan sikap implementor untuk memindahkan PKL ke tempat semestinya. namun didalam kebijakan ini implemtor tidak menggunakan sikap tersebut ntuk memindahkan PKL ke tempat semestinya. hal inilah yang menyebabkan kebijakan ini tidak berjalan maksimal dalam mewujudkan ketertiban dan keindahan kota. karena dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL di Kecamatan Manggar para implemetor masih mempertimbangkan kepentingan umum, baik sosial, budaya, estetika, ekonomi, dll. Terakhir dari faktor Struktur birokrasi yang dimilki setiap instansi yang bertanggungjawab atas kebijakan penataan dan pembinaan PKL dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan instansi yang terlibat dalam kebijakan penataan PKL. implemetor bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan sesuai dengan strata jabatan yang diduduki individu

Kata Kunci :PKL, Impementasi Kebijakan, Penataan dan Pembinaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pada saat ini, kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Hal ini selain karena faktor kebutuhan primer manusia, juga disebabkan adanya perkembangan era modern yang semakin memaksa manusia sehingga harus bersaing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam dunia persaingan dagang, di kota-kota besar di Indonesia saat ini banyak sekali didirikan mall-mall yang semakin mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini memicu para pedagang kecil bermunculan di sekitar daerah mall-mall dan juga daerah lain di pinggir jalan kota-kota besar di Indonesia.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) seakan-akan telah menjadi masalah laten yang sulit diselesaikan oleh setiap pemerintah daerah di negara ini. Pedagang kali lima (PKL) adalah salah satu jenis pedagang yang ada di negara ini, ciri khasnya tentu selalu membawa gerobak ataupun tas yang akan membantu mereka dalam menjajakan dagangan mereka. Pedagang kaki lima adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal menggunakan fasilitas umum baik lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak (Pasal 1 (5) Peraturan Bupati Belitung Timur No 61 Tahun 2013 tentang Penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima).

Namun apa yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima ini dianggap dapat mengganggu ketertiban umum, masih adanya beberapa

pedagang kaki lima yang tidak tertib dan disiplin dalam menjajakan dagangannya membuat suatu daerah menjadi terlihat tidak teratur. Para pedagang kaki lima berjualan di tempat yang dilarang oleh pemerintah karena dapat membuat suatu tempat tidak enak di pandang jika terdapat pedagang kaki lima, terlebih lagi keberadan pedagang kaki lima dapat menyebabkan kemacetan yang parah karena mereka berjualan di trotoar bahkan di pinggir jalan.

Berdasarkan sumber dari Badan Pusat Statistik tahun 2018 , jumlah PKL di setiap daerah terus meningkat setiap tahunnya. Karena itu permasalahan ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas ketertiban dan keindahan kota. Pada dasarnya para pedagang kecil yang biasa kita kenal sebagai pedagang kaki lima (PKL) ini tidaklah salah dalam berdagang, tetapi tempat di mana mereka menjual barang dagangan inilah yang perlu mendapat sorotan dari pemerintah kota setempat. Karena jika hal ini tetap dibiarkan, maka para PKL akan semakin menjamur dan tidak menutup kemungkinan akan memakan jalan raya sebagai tempat dagang mereka yang akan menyebabkan tidak tertibnya para pengguna jalan akibat penyempitan jalan raya yang disebabkan oleh para PKL. Hal ini tidak lepas pula dari pengamatan Pemerintah daerah Belitung Timur yang melihat semakin banyaknya PKL dikota .

Sampai saat ini pemerintah daerah Belitung Timur sudah melakukan penataan dengan cukup baik bagi para pedagang kaki lima ini, namun di beberapa titik masih bisa saya jumpai para pedagang kaki lima

yang tidak teratur berjualan diluar zona PKL yang telah ditetapkan. Oleh karena itulah pemerintah membuat suatu aturan yang nantinya akan mengatur para pedagang kaki lima supaya mereka bisa lebih tertib lagi dalam menjalankan kegiatan mereka sehingga suatu daerah bisa terlihat lebih indah dan rapih. Namun tidak banyak para pedagang kaki lima yang mau menuruti aturan tersebut, berbagai macam alasan seperti sepinya pembeli terkadang membuat mereka nekat untuk melanggar peraturan yang telah di buat oleh pemerintah. yang sangat dirugikan dari keberadaan pedagang kaki lima yang mangkal di bahu jalan dan trotoar ini tentu para pengendera kendaraan pribadi yang temaksa menghadapi kemacetan parah dan para pejalan kaki yang mana trotoar yang seharusnya menjadi jalur para pejalan kaki namun di isi oleh para pedagang kaki lima. Padahal hak pejalan kaki untuk menggunakan trotoar sudah di atur dalam UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan.

Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur ialah Jumlah pedagang kaki lima selalu bertambah namun tidak adanya pendataan terkait pedagang kaki lima ini. mereka berjualan di atas trotoar dan sekarang di pindahkan ke areal taman kota di depan kantor kecamatan. hal ini menumbulkan keresahan masyarakat lainnya karena para pembeli memarkirkan motor atau mobil di bahu jalan yang membuat jalanan menjadi sempit dan rawan kecelakaan karena kondisi jalan yang berada di Sistem satu arah (SSA) yang merupakan jalan utama. kebersihan kawasan taman kota sangat rentan dan kontraproduktif dengan rencana

mewujudkan taman kota sebagai keindahan kota. (https://m.belitung.go.id/read/27/unjuk-rasa-pkl-pasar-tanjungpandan)

Mengenai penataan pedagang kaki lima di kecamatan Manggar sendiri telah diatur di dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 61 Tahun 2013 yang memuat mengenai lokasi pedagang kaki lima, perizinan, kewajiban dan larangan. Untuk lokasi penataan dan tempat usaha pedagang kaki lima Pemerintah menetapkan sebagai berikut:

1. Lokasi PKL dibagi ke dalam 2 (dua) bagian sebagai berikut:
   a. zona bukan PKL yaitu lokasi yang tidak terdapat PKL; dan
   b. zona PKL yaitu lokasi yang diperuntukan berdagang bagi PKL.

   (Pasal 6 Peraturan Bupati Belitung Timur No 61 Tahun 2013 tentang Penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima).
2. Tempat Usaha
   a. Zona bukan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan bagian ruang dalam kawasan perkotaan dan perdesaan yang apabila terdapat PKL didalamnya dapat menggangu kenyamanan dan fungsi/kegiatan lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
   b. Untuk kepentingan tertentu/khusus zona bukan PKL dapat diperuntukan oleh PKL dengan izin Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

   (Pasal 7 Peraturan Bupati Belitung Timur No 61 Tahun 2013 tentang Penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima).

3. Zona PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan bagian ruang dalam kawasan perkotaan dan perdesaan tertentu yang diperbolehkan berdagang bagi PKL sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Pasal 8 Peraturan Bupati Belitung Timur No 61 Tahun 2013 tentang Penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima).

Permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut adalah tidak beraturannya Pedagang Kaki Lima yang berjualan di daerah tersebut, posisi Pedagang kaki lima yang terlampau maju mendekati jalan umum menyebabkan permasalahan baru yaitu kemacetan kendaraan bermotor serta banyaknya sampah yang berserakan di jalanan. Padahal pada Peraturan yang berlaku sudah dijelaskan tentang penataan Pedagang Kaki Lima yang bertujuan untuk melakukan penataan agar tidak mengganggu kepentingan umum. Tetapi pada kenyataannya masih banyaknya Pedagang kaki lima yang lokasinya menyebabkan terganggunya arus lalu lintas.

Dalam melakukan penertiban masih saja menemukan oknum pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan tersebut, alasan mereka tetap nekat adalah karena lokasi tersebut merupakan pusat keramaian yang membuat mereka mendapat keuntungan yang lumayan saat berjualan di kawasan tersebut. Hal ini tentu sangat disayangkan, apalagi Dinas Ketertiban daerah maupun kecamatan sudah gencar melakukan sosialisasi terhadap pedagang kaki lima tersebut. Jika kita melihat secara langsung keberadaan para pedagang kaki lima kita akan

melihat padatnya lalu lintas dikawasan tersebut ditambah lagi para pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan tersebut tidak teratur dalam menggelar lapak dagangannya sehingga hal ini mengakibatkan kawasan tersebut menjadi kurang nyaman.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian terhadap penataan pedagang kaki lima dengan mengangkat judul "Implementasi Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima Di kecamatan Manggar, kabupaten Belitung Timur"

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur?
2. Apa faktor-faktor yang berperan dalam Implementasi Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pemerintah kota dalam Implementasi Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima Di kecamatan Manggar, kabupaten Belitung Timur.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima Di kecamatan Manggar, kabupaten Belitung Timur**.**

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis**.**

1. Manfaat Teoritis
   a. Dengan adanya penelitian ini maka harapannya dapat menjadi referensi menambah pengalaman, wawasan pengetahuan peneliti dan perguruan tinggi khususnya Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa tentang Implementasi Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima Di kecamatan Manggar, kabupaten Belitung Timur.
   b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan pelayanan dan salah satu sumbangan pemikiran tentang ke efektifan suatu Perda Khusus dan pada umumnya bagi Pemerintah Daerah Belitung Timur.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi Peneliti : untuk menambah wawasan serta pengalaman terkait Implementasi Peraturan Bupati

Belitung Timur Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima Di kecamatan Manggar, kabupaten Belitung Timur.

b. Bagi Pedagang Kaki Lima : menjadi masukan bagi pedagang kaki lima sehingga dapat ikut memberikan dampak positif bagi pelaksanaan Pembangunan tata Daerah Belitung Timur.

c. Bagi Pemerintah daerah dan Stakeholder terkait : kegunaan penelitian ini bagi Pemda Belitung Timur dan stakeholder yaitu dapat menjadi masukan dalam pembangunan, serta diharapkan bisa membuat suatu tempat khusus bagi Pedagang Kaki Lima sehingga tidak merusak tatanan daerah Belitung Timur.

E. KERANGKA TEORI

1. Konsep tentang kebijakan

Menurut Thomas Dye dalam AG. Subarsono (2010:2) Pengertian kebijakan adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Definisi diatas mengandung makna bahwa:

1. Kebijakan itu dibuat oleh pemerintah bukan swasta,
2. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

David Easton dalam AG. Subarsono (2010:3) mengatakan bahwa ketika pemerintah membuat kebijakan, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung nilai di dalamnya. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan hal bijaksana, kepandaian menggunakan akal budaya (pengalaman dan pengetahuannya)

a. Pimpinan cara bertindak (mengenai pemerintah, perkumpulan).
b. Kecakapan bertindak jika menghadapi orang lain (kesulitan dan sebagainya).

Menurut Hoogermerf (1988:66) dalam http://eprints.umm.ac.id/ ada dua cara untuk memahami kebijakan. Pertama, mendekati suatu kebijakan (policy) melalui substansinya (yakni rumusan-rumusan redaksi suatu kebijakan berisi aturan-aturan yang hendak

dicapai) dan kedua, memahami kebijakan dari proses pelaksanaannya yang membeberkan kepada kita hasil dan dampak dari kebijakan tersebut, baik yang bersifat sementara maupun final. Pada dasarnya, makna kebijakan yang dimaksudkan oleh Hooggermerf tidaklah jauh beda dengan pemahaman umum masyarakat tentang bentuk suatu kebijakan berupa pernyataan-pernyataan yang dihasilkan oleh legislatif, selanjutnya fungsi pengaturan dan penataan yang diperankan oleh eksekutif, hingga pada pengguna anggaran negara dan juga kegiatan apapun selama hal tersebut menjadikan masyarakat sebagai sasarannya. Sedangkan menurut Cart Friedch dalam Solichin A.W (2005:3) bahwa kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Kebijakan dalam pengertian pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan mengandung makna adanya kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan. Kehendak dinyatakan berdasarkan otoritas yang dimiliki untuk melakukan pengaturan dan jika perlu dilakukan pemaksaan. Menurut Faried Ali & A. Syamsu Alam (2011:37) “pernyataan kehendak oleh otoritas dikaitkan dengan konsep pemerintah memberikan pengertian atas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang disebut sebagai kebijaksanaan pemerintah. Tetapi kebijakan-kebijakan pemerintah dapat berkonotasi

sebagai kebijakan Negara ketika pemerintah yang melakukan di arahkan kepada pemerintah Negara. Sedangkan jika kebijakan pemerintah dipahami dari sasaran yang akan di capai (diatur) dimana sasaranya adalah publik tidak saja dalam pengertian negara akan tetapi dalam pengertian pemerintah dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik".

James. E. Anderson dalam Solichin A.W (2005:2), mengatakan bahwa kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Oleh karena itu, Faried Ali & A. Syamsu Alam (2011: 37-38) menyimpulkan bahwa "kebijakan pemerintah dapat bermakna kebijakan pemerintah (arti sempit dan luas), kebijakan aparatur Negara atau pemerintah, kebijakan birokrasi, kebijakan administrasi Negara, kebijakan kelembagaan Negara dan pemerintahan, dan kebijakan yang dilakukan oleh pegawai negeri". Kebijakan merupakan suaru program di dalam pencapaian tujuan, nilai dan praktek yang terarah. Tujuan dari suatu kebijakan harus jelas agar dalam implementasinya tidak menimbulkan salah penafsiran. Dalam aktualisasi kebijakan pada tingkat-tingkat pemerintahan berdasarkan Undang-Udang No 5 tahun 1974 memberi petunjuk bahwa dari sekian kebijakan yang berlangsung, yaitu : (1) kebijakan strategis, (2) kebijakan taktis operasional, (3) kebijakan teknis operasional. Kebijakan strategis adalah kebijakan yang dirincikan oleh sejumlah

ketidakpastian dan berorientasi kemasa depan. Disinilah dituntut kemampuan suatu kebijakan untuk dapat menyesuaikan tuntutan lingkungan yang berubah dan berbeda, sebagaimana keberlakuan Undang-Undang di tingkat pemerintah pusat. Kebijakan taktis operasional adalah yang berhubungan dengan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang pendek dan berkaitan dengan penentuan sumber daya untuk mencapai tujuan. Kebijakan teknis operasional adalah kebijakan yg berisikan standar-standar yang harus diperlukan.

2. Tahap-tahap kebijakan publik

Kebijakan publik disusun melalui tahapan-tahapan tertentu, dimana terdapat seorang atau sekumpulan aktor di setiap tahapan-tahapan penyusunan kebijakan publik tersebut. Menurut William N. Dunn (20013:24) dalam tahapan-tahapan kebijakan publik terdiri dari:

a. Tahap penyusunan agenda. Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah apada agenda publik. Sebelumnya masalah- masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada, akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.
b. Tahap formulasi kebijakan. Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah- masalah tadi didentifinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal

dari berbagai alternatif yang ada. Pada tahap ini masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

c. Tahap adopsi kebijakan, dari beberapa alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Tahap implementasi kebijakan, Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.

e. Tahap penilaian kebijakan, Kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat. Ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Menurut William N Dunn (1994) dalam tahapan- tahapan kebijakan publik dapat dijelaskan bahwa analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politik tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilai kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, peramalan

(*forecasting*), rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual.

3. Konsep Tentang Implementasi

Hinggis (1985) dalam Harbani Pasolong (2011:57) mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua yang diterbitkan oleh Dapartemen Pendidikan dan kebudayaan (1991) ditegaskan arti implementasi atau Im. Ple. Men. Ta. Si. Sebagai ; pelaksanaan atau penerapan. Sedang secara Etimologis, Implementasi mengandung arti sebagai realisai atau tindak lanjut dari suatu pelaksanaan yang mencakup perihal perbuatan dan usaha tertentu.

Implementasi dalam arti harfiah adalah pelaksanaan. Untuk lebih jelasnya, implementasi dapat diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan berkesimbungan yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program menjadi kenyataan. Bernardine R. Wijaya & Susilo Supardo dalam Harbani Pasolong (2011:57) mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktek. Secara garis besar implementasi dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan menurut rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Solichin A.W (2005 : 65), mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah

suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatiaan implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah di putuskan legistlatif atau cara pengambilan keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataan dapat dilihat sendiri bahwa betapapun baiknya rencana yang telah dibuat tetapi tidak ada gunanya apa bila itu tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Ia membutuhkan pelaksana yang benar-benar jujur, untuk menghasilkan rambu-rambu pemerintahan yang berlaku. Gordon (1986) dalam Harbani Pasolong (2011:58) mengatakan implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Selanjutnya Van Meter dan Van Hom dalam Solichin A.W (2005:65), kemudian memberikan pengertian tentang implementasi yaitu : “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. Pressman dan Wildavsky dalam Solichin A.W (2005:65) “menyatakan bahwa sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan

kata benda kebijaksanaan". Sehingga bagi kedua pelopor studi implementasi ini maka proses untuk melaksanakan kebijakan perlu mendapatkan perhatian yang seksama dan oleh sebab itu adalah keliru kalau kita mengganggap bahwa proses tersebut dengan sendirinya akan berlangsung mulus.

Oleh sebab itu Solichin A.W (2005 : 59) mengatakan bahwa "Tidak terlalu salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari seluruh proses kebijakan". Lebih jauh lagi Solichin A.W (2005 : 102) kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam suatu proses implementasi, berupa :

1. Output–output kebijakan (keputusan-keputusan) dari badan-badan pelaksana.
2. Kepatuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap keputusan tersebut.
3. Dampak nyata keputusan-keputusan badan pelaksana.
4. Persepsi terhadap dampak keputusan-keputusan tersebut.

Evaluasi sistem politik terhadap undang-undang, baik berupa perbaikan-perbaikan mendasar (upaya untuk melaksanakan perbaikan) dalam muatan atau isinya.

Dalam implementasi kebijakan terdapat berbagai hambatan. Gow dan Morss dalam Harbani Pasolong (2011:59) mengungkapkan antara lain:

1. Hambatan politik, ekonomi dan lingkungan
2. Kelemahan institusi

3. Ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administrasi
4. Kekurangan dalam bantuan teknis
5. Kurangnya desentralisasi dan partisipasi
6. Pengaturan waktu
7. Sistem informasi yang kurang mendukung
8. Perbedaan agenda tujuan antar aktor
9. Dukungan yang berkesimbangan.

4. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut Pressman & Wildavsky mengungkapkan :

a. Implementasi adalah proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya.
b. Implementasi memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.
c. Efektivitas implementasi ditentukan oleh kemampuan untuk membuat hubungan dan sebab-akibat yang logis antara tindakan dan tujuan.

Majone dan Wildavsky dalam (Nurdin dan Usman, 2002), mengartikan implementasi sebagai evaluasi. Sedangkan Browne dan Wildavsky dalam (Nurdin Usman, 2002:70) mengemukakan bahwa “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan

juga dikemukakan oleh mclaughin dalam (Nurdin dan Usman, 2002). Ungkapan-ungkapan tersebut mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Secara sederhana implementasi diartikan pelaksanaan atau penerapan. Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem.

Studi implementasi adalah studi perubahan yang terjadi dan perubahan bias dimunculkan, juga merupakan studi tentang mikro struktur dari kehidupan politik yaitu organisasi diluar dan didalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain dan motifasi yang membuat betindak secara berbeda (Parsons, 2005:463). Dalam setiap perumusan suatu tindakan apakah itu menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan selalu diiringi dengan suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi, karena suatu kebijaksanaan tanpa diimplementasikan maka tidak akan banyak berarti. Sesuai dengan hal tersebut Hal Meter dan Van Horn dalam (Winarno, 2008:146) mengemukakan,"implementasi kebijakan sebagai tindakan- tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya".

Standar dan sasaran kebijakan didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan pencapaian kebijakan. Mengidentifikasi indikator-indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam analisis impelentasi kebijakan indikator-indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Dampak kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Para peminat perbandingan politik dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil kebijakan. Faktor implementasi, keputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil, namun menurut Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2008:158), faktor-faktor ini mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.

Sedangkan menurut George C.Edwards (2003:1). ”Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan kensekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu dapat mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik dapat mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Selanjutnya dikemukakan oleh Charles O'Jones (Harahap, 2004:15) mengemukakan "Implementasi adalah suatu proses interaktif dengan kegiatan-kegiatan kebijaksanaan yang mendahuluinya, dengan kata lain mengoprasikan sebuah program dengan pilar-pilar organisasi, interpretasi dan pelaksanaan". Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier (Agustina,2006), menjelaskan lebih lanjut tentang konsep implementasi kebijakan sebagai berikut: Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yaitu mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Sedangkan Wibawa (Tangkilisan, 2003:20) berpendapat "Implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapar direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah".

Berdasarkan pendapat para ahli dalam menentukan tahapan implementasi kebijakan tersebut, terlihat bahwa implementasi program adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap sesuatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun implementasi kebijakan yang sesuai dengan penelitian ini adalah menggunakan teori Charles O'jones dengan

melalui tiga pilat yaitu organisasi, implementasi dan pelaksanaan dikarenakan lokasi penelitian ini merupakan daerah yang masih membutuhkan peraturan daerah, sarana dan tenaga professional untuk mendukung teori tersebut yaitu struktur organisasi keahlian pelaksana, perlengkapan alat uji yang sesuai dengan peraturan pemerintah, sesuai dengan petunjuk pelaksana dan teknis, prosedur kerja dan program kerja yang jelas serta jadwal kegiatan pelaksanaan yang tetap.

5. Model Implementasi Kebijakan

Model Implementasi kebijakan Merilee S. Grinde (1980) Seperti yang dikutip oleh Dwijowijoto (2006: 132) model ini ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya, ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, dilakukan implementasi kebijakan. Keberhasilan ditentukan oleh derajat *implementability* kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup:

a. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan
b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
c. Derajat perubahan yang diinginkan
d. Kedudukan pembuat kebijakan
e. Siapa pelaksana program
f. Sumber daya yang dikerahkan.

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
b. Karateristik lembaga dan penguasa.
c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Model Implementasi Kebijakan menurut Goerge Edwards III yang dikutip oleh Dwijowijoto,(2006: 138). Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edwards membicarakan empat faktor atau variablel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor utama atau variabel-variabel tersebut adalah :

a. Komunikasi
b. Sumber-sumber
c. Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku
d. Struktur birokrasi

Menurut Edwadrs III dalam Widodo (2010:96), ke empat faktor ini berpengaruh terhadap implementasi kebijakan dan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan, maka pendekatan yang ideal adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas ini dengan membahas semua faktor sekaligus.

6. Pemilihan model implementasi kebijakan

Problem implementasi bisa dikonstruksi dengan cara yang berbeda- beda. Setiap model memberikan beberapa pandangan pada dimensi tertentu dari realitas, seperti dalam kasus perdebatan antara pendekatan top-down versus bottom-up, kedua pendekatan beserta percabangan dan variannya memberi kita sebagian dari keseluruhan gambaran. Adanya pendekatan dengan model yang berbeda-beda mengandung keunggulan komparatif sebagai penjelasan dalam konteks yang berbeda-beda. Setiap kerangka pemikirannya akan

mengungkapkan atau menjelaskan beragam dimensi implementasi. Dengan demikian, tidak ada satu metafora tunggal yang dapat memberikan semua jawaban.

Dari beberapa model implementasi kebijakan yang ada diatas, dapat dilihat bahwa kebijakan dan implementasinya merupakan satu tahapan yang penting diantara tahapan lainnya serta saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian maka, implementasi memegang peranan penting dalam keberhasilan suatu perencanaan strategis, yang lebih bersifat opersional. Dalam model diatas, peneliti memadukan dengan konsep model yang lebih relevan dengan penelitian ini, maka peniliti memilih menggunakan kerangka model analisis implementasi kebijakan (*A Model Framework for Policy Implementation Analisys*) oleh Mazmaniandan Paul (1983: 43) Hal ini dikarenakan karena persoalan pedagang kaki lima merupakan suatu kebijakan yang benar-benar komprehensif dan membutuhkan analisa yang mendalam. Berhasil tidaknya Implementasi kebijakan.

7. Teori-teori implementasi kebijakan

   A. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn Menurut meter dan Horn dalam AG. Subarsono (2010:99), ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni :

      1. Standar dan sasaran kebijakan, Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi

multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik antar agen implementasi

2. Sumber daya, Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia *(human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resourse*)
3. Hubungan Antar Organisasi, Dalam bentuk banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
4. Karakteristik agen pelaksana, Yang dimaksud kerakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola- pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonnomi. Veriabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
6. Disposisi implementor atau sikap pelaksana. Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Disposisi implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksanaan (*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang

dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahamandan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan

B. Teori George Edward III

Edward III dalam AG. Subarsono (2010:90), ,mengusulkan 4 (empat) veriable yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu :

1. *Commonication* (komunikasi); komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas kebawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsentrasi dalam menyampaikan informasi
2. *Resourcess* (sumber-sumber); sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Yang termasuk sumber-sumber dimaksud adalah:

a. Staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan.
b. Informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi
c. Dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan
d. Wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan.

3. *Dispotition or Atitude* (sikap); berkaitan dengan bagaimana sikap implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Seringkali para implementor bersedia untuk mengambil inisiatif dalam rangka mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh mana wewenang yang dimilikinya
4. *Bureaucratic structure* (struktur birokrasi); suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Kewenangan ini berkaitan dengan struktur birokrasi yang melekat pada posisi/strata kelembagaan atau individu sebagai pelaksana kebijakan. Karakteristik utama dari birokrasi

umumnya tertuang dalam prosedur kerja atau Standard Operating Procedures (SOP) dan fregmentasi organisasi

C. Teori Mazmanian dan Sabatier

Mazmanian dan Sabatier dalam AG. Subarsono (2010:94), implementasi kebijakan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga variabel, yaitu:

a. Karakteristik masalah :

1. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, disatu pihak ada masalah sosial yang secara teknis mudah dipecahkan di pihak lain ada masalah yang sulit di pecahkan.
2. Tingkat kemejemukan dari kelompok sasaran, ini berarti bahwa suatu program relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasaranya adalah homogen. Sebaliknya jika kelompok sasaran adalah heterogen, maka implementasi program akan lebih sulit, karana tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran terhadap program relatif berbeda.
3. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, sebuah orogram relatif sulit di implementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program akan relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar.

4. Cakupan perubahan perilaku yanng diharapkan, sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kogniti akan lebih mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sifat dan prilaku masyarakat.

b. Karakteristik kebijakan:

1. Kejelasan isi kebijakan, ini berarti bahwa makin jelas dan makin rinci kebijakan maka akan mempermudah implementor dalam memahami isi kebijakan dan menterjemahkan dalam tindakan nyata.
2. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis.
3. Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut dalam hal ini mengenai sumber daya keuangan dan staf.
4. Hubungan atau dukungan antar organisasi pelaksana, kegagalan program bisa disebabkan kurangnya koordinasi vertical dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam suatu program.
5. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
6. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan dalam hal melaksanakan tugas dan pekerjaan atau program-program.

7. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar yaitu masyarakat untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Karena kebijakan yang melibatkan masyarakat akan lebih mudah untuk berhasil di banding yang tidak melibatkan masyarakat.

c. Veriabel Lingkungan:

a. Kondisi sosial ekonomi dan tingkat kemajuan teknologi, masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan lebih mudah menerima program-program pembaruan di banding masyarakat yang tertutup dan tradisional. Demikian juga kemajuan tekhnologi akan membantu dalam keberhasilan proses implementasi program, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan di implementasikan dengan bantuan teknologi modern.

b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan, kebijakan yang bersifat insentif biasanya mudah mendapat dukungan publik. Sebaliknya kebijakan yang bersifat disinsentif akan kurang mendapat dukungan publik.

c. Sikap dari kelompok pemilih.

d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah veriabel yang paling krusial.

D. Teori Merilee S. Grindle

Menurut Grindle dalam AG. Subarsono (2012 : 93), implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebiijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan, mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target grup temuat dalam isi kebijakan.
2. Jenis manfaat yang akan diterima oleh target grup
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Kedudukan pembuat kebijakan
5. Pelaksanaan program
6. Sumber daya yang diarahkan

Sementara itu, konteks implementasi adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
2. Karakteristik, lembaga dan penguasa
3. Kepatuhan dan daya tanggap

Model Grindle ini lebih menitik beratkan pada konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementator, sasaran dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor

implementasi serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

8. Pedagang kaki lima

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya. menurut Perbup No.61 Tahun 2013 PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.

Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalanan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima. Padahal jika merunut sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 1 ayat(1) dijelaskan bahwa Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah dan swasta yang bersifat sementara.

Menurut Soedjana (1981) dalam kutipan Hilal (2013), mendefinisikan PKL sebagai sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual di atas trotoar atau di tepi/di pinggir jalan, di sekitar pusat perbelanjaan/pertokoan, pasar, pusat rekreasi/hiburan, pusat perkantoran dan pusat pendidikan, baik secara menetap atau setengah menetap, berstatus tidak resmi atau setengah resmi dan dilakukan baik pagi, siang, sore maupun malam hari.

Proses perencanaan tata ruang, sering kali belum mempertimbangkan keberadaan dan kebutuhhan ruang untuk PKL. Ruang-ruang kota yang tersedia hanya difokuskan untuk kepentingan kegiatan dan fungsi formal saja. Kondisi ini yang menyebabkan para Pedagang Kaki Lima berdagang di tempat-tempat yang tidak terencana dan tidak difungsikan untuk mereka.Akibatnya mereka selalu menjadi obyek penertiban dan pemerasan para petugas ketertiban serta menjadikan kota berkesan semraut.

(http://syamsuhilal.blogspot.com/2013/04/upaya-penataan-dan-pembinaan-pedagang.html)

Studi menunjukkan bahwa hampir di semua negara-negara Asia, PKL tidak mempunyai status legal dalam menjalankan usahanya dan mereka terus mendapatkan tindakan kekerasan oleh pemerintah kota dengan program yang mengatasnamakan penertiban atau penataan. Di sisi lain, peran yang dijalankan sektor informal termasuk PKL belum sepenuhnya diterima pemerintah kota. PKL lebih dipandang sebagai aktivitas non-profit, karena tidak berkontribusi pada ekonomi lokal atau nasional melalui pajak. Mereka dimarginalkan dalam agenda pembangunan, dengan demikian terkena dampak buruk dari kebijakan makro sosio-ekonomi. (https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalilmiahsociety/article/view/15059/14626)

Terbatasnya dukungan kebijakan membuat sektor ini tidak aman yang berdampak buruk pada mata pencaharian penduduk miskin urban. Mereka terkenal karena memberikan sebagian penduduk urban kebutuhan barang atau jasa yang tidak dapat disediakan oleh outlet ritel besar. Disamping fakta bahwa PKL adalah sumber mata pencaharian penting bagi penduduk miskin urban, PKL juga menempati badan-badan jalan dan trotoar dan tidak menyisakan cukup ruang bagi pejalan kaki. Kondisi ini menjadi perhatian publik karena menciptakan masalah kemacetan dan pergerakan orang di pedestrian, dan menciptakan lingkungan kotor dan kurang sehat. PKL yang

menempati ruang dan jalan publik juga dapat menciptakan masalah sosial seperti hadirnya pencopet, pencuri, dan sebagainya. Situasi ini menciptakan masalah dalam pengelolaan, pembangunan dan merusak morfologi dan estetika kota.

PKL atau dalam bahasa inggris disebut juga *street trader* selalu dimasukkan dalam sektor informal. Dalam perkembangannya, keberadaan PKL di kawasan perkotaan Indonesia seringkali kita jumpai masalah-masalah yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kesan kumuh, liar, merusak keindahan, seakan sudah menjadi label paten yang melekat pada usaha mikro ini. Mereka berjualan di trotoar jalan, di taman-taman kota, di jembatan penyebrangan, bahkan di badan jalan. Pemerintah kota berulangkali menertibkan mereka yang ditengarai menjadi penyebab kemacetan lalu lintas atau pun merusak keindahan kota. PKL dipandang sebagai bagian dari masalah (*part of problem*).

Upaya penertiban, sebagaimana sering diekspose oleh media televisi acapkali berakhir dengan bentrokan dan mendapat perlawanan fisik dari PKL sendiri. Bersama dengan komponen masyarakat lainnya, tidak jarang para PKL pun melakukan unjuk rasa. Padahal, bila keberadaannya dipoles dan ditata dengan konsisten, keberadaan PKL justru akan menambah eksotik keindahan sebuah lokasi wisata di tengah-tengah kota. Hal ini bisa terjadi apabila PKL dijadikan sebagai bagian dari solusi (*part of solution*).

Seperti yang sudah dikemukakan di atas, PKL yang dikelompokkan dalam sektor informal sering dijadikan sebagai kambing hitam dari penyebab kesemrawutan lalu lintas maupun tidak bersihnya lingkungan. Meskipun demikian PKL ini sangat membantu kepentingan masyarakat dalam menyediakan lapangan pekerjaan dengan penyerapan tenaga kerja secara mandiri atau menjadi *safety belt* bagi tenaga kerja yang memasuki pasar kerja, selain untuk menyediakan kebutuhan masyarakat golongan menengah ke bawah. Pada umumnya sektor informal sering dianggap lebih mampu bertahan hidup (*survive)* dibandingkan sektor usaha yang lain. Hal tersebut dapat terjadi karena sektor informal relatif lebih independent atau tidak tergantung pada pihak lain, khususnya menyangkut permodalan dan lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan usahanya.

Bukti-bukti tersebut menggambarkan bahwa pekerjaan sebagai PKL merupakan salah satu pekerjaan yang relatif tidak terpengaruh krisis ekonomi karena dampak krisis ekonomi tidak secara nyata dirasakan oleh pedagang kaki lima. Dalam hal ini PKL mampu bertahan hidup dalam berbagai kondisi, sekalipun kondisi krisis ekonomi.

9. Pembinaan pedagang kaki lima

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “pembinaan” berasal dari kata “bina” yang artinya sama dengan “bangun”. Jadi pembinaan dapat diartikan sebagai pembangunan yaitu mengubah

sesuatu sehingga menjadi baru yang memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi. Pembinaan merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan daya saing. Berdasarkan pada pengertian pembinaan seperti tersebut di atas, maka pembinaan PKL, diartikan sebagai memberikan pengarahan, bimbingan dan juga melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perkembangan PKL sehingga keberadaan PKL dapat memberikan manfaat bagi kehidupan sosial perkotaan tanpa harus menjadi unsur pengganggu kenyamanan warga kota.

Menurut Mangunhardjana(1986:12) mendefinisikan pembinaan dalam konteks manajemen yang berarti makna dan pengertian yang terungkap masih sekitar persoalan pengelolaan untuk mencapai hasil yang terbaik. Menurut Widodo (2008: 22), menjelaskan hal-hal yang baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya, untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara lebih efektif".

Dari definisi tersebut, pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan sikap dan ketrampilan dengan harapan mampu mengangkat nasib dari obyek yang dibina. Dalam pembinaan, dilatih untuk mengenal kemampuan dan mengembangkannya agar dapat memanfaatkannya secara penuh dalam bidang hidup atau kerja mereka.

a. Arah pembinaan

Dalam menangani PKL perlu mencari solusi yang baik dan bijaksana, karena pemusnahan tanpa memberi jalan keluar dengan memberi tempat yang memenuhi syarat, sama saja dengan mematikan tumbuhnya ekonomi kerakyatan, yang notabene sumber hidup masyarakat bawah. Sektor ini membutuhkan perhatian yang lebih baik lagi dari pihak pemerintah. Oleh karena itu, jalan yang terbaik untuk menangani sektor ini adalah melalui pembinaan.

Namun pembinaan sektor informal ini juga memiliki dampak negatif dalam kaitannya dengan gejala urbanisasi. Sebab pembinaan yang menguntungkan sektor informal ini akan memancing orang-orang desa lainnya masuk ke sektor informal perkotaan. Hal ini akan menambah beban urbanisasi yang dihadapi kota. Oleh karena itu, program pembinaan sektor informal harus dijalankan secara terpadu dengan pembinaan perekonomian dan sektor informal di pedesaan agar pembinaan itu tidak menjadi bumerang bagi maksud baik pembinaan itu sendiri.

b. Langkah-langkah Pembinaan

Pembinaan dalam sektor informal bukan hanya menyangkut mereka yang menggeluti bidang PKL, melainkan juga organ kepemerintahan yang ada di dalam instansi yang terkait dengan bidang tersebut. Oleh karena itu, aktivitas-aktivitas program

pembinaan PKL dapat dikelompokkan ke dalam empat pendekatan yaitu:

1. Mendorong sektor-sektor yang ada menjadi formal. PKL diorientasikan nantinya dapat mendirikan toko-toko yang permanen. Untuk itu tentu diperlukan dukungan moral dan latihan manajerial serta pengetahuan teknis. Pendirian toko-toko yang permanen tentunya didirikan pada tempat-tempat yang memang khusus untuk menampung pedagang-pedagang formal. Misalnya, pasar, pusat- pusat perbelanjaan modern, dan lain-lain. Dengan demikian penempatan mereka harus dibekali dengan penyuluhan-penyuluhan yang berkaitan dengan bidang usahanya masing-masing. Setelah mendapatkan bimbingan dan binaan, dalam jangka waktu tertentu diharapkan usaha PKL menjadi lebih maju dan bersedia serta mampu untuk pindah ke pasar-pasar atau toko-toko sesuai dengan jenis barang dagangannya. Peningkatan ini disamping meningkatkan kemampuan dan penghasilan tenaga yang bersangkutan, juga cenderung untuk menambah kesempatan kerja dan lebih mudah dicatat sebagai wajib pajak.
2. Meningkatkan kemampuan dalam usaha sektor informal. PKL dapat dibantu melalui penyediaan bahan baku atau membantu kelancaran pemasaran.Selain itu, untuk menambah kebersihan dan kecantikan wilayah PKL, pemerintah dapat

membantu dengan memberi gerobak supaya seragam atau pemerintah hanya memberi petunjuk alat peraga (rombong bagi PKL) dengan bentuk, ukuran dan ciri khas lainnya. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan dalam usaha PKL hendaknya sewa lokasi atau pungutan uang harus benar-benar menciptakan keadilan untuk masing-masing PKL.

3. Dilakukan relokasi yaitu penempatan para PKL di lokasi baru. Penempatan PKL di lokasi yang baru ini dianggap penting karena PKL sering dianggap menimbulkan kerugian sosial misalnya kemacetan jalan. Namun penempatan ini perlu dipertimbangkan faktor konsumen dan kemampuan penyesuaian lokasi baru bagi yang berusaha di sektor petugas, akan tetapi di pihak lain yang tidak kalah pentingnya adalah konsistensi pengaturan yang perlu diterapkan.
4. Dalam penanganan usaha sektor informal adalah mengalihkan usaha yang sama sekali tidak mempunyai prospek ke bidang usaha lain. Pendekatan ini bagi PKL, tidak sepenuhnya sesuai karena yang diharapkan oleh PKL biasanya bukan pengalihan usaha atau penggantian bidang usaha melainkan peningkatan usaha mereka. Bidang usaha PKL ini dipandang masih mempunyai prospek untuk lebih maju.Dari uraian diatas, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa aktivitas- aktivitas program pembinaan PKL dapat dilakukan dengan mendorong sektor informal

menjadi formal, meningkatkan kemampuan dalam usaha sektor informal serta menyediakan lokasi baru bagi para PKL pasca penertiban PKL, dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi PKL.

F. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Dalam pengambilan ruang lingkup ini, peneliti menggunakan ruang ligkup yang bersal dari teori George Edward III. Sesuai dengan pembahasan di atas, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada:

1. Komunikasi (Sosialisasi, Pembinaan dan Kejelasan prosedur) dari implementasi kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di kecamatan manggar, kabupaten Belitung Timur
2. Sumber-sumber (Implementor, Efektivitas kerja, Kompetensi implementor dan pemahaman implementor itu sendiri).
3. Disposisi (Karakteristik implementor, Kewenangan yang diberikan dan Kualitas pelayanan).
4. Struktur birokrasi (*Standar Operating Procedures*) kecamatan Manggar dan Pemerintah kabupaten Belitung Timur.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena penelitian ini menyajikan, melukiskan atau menggambarkan data secara deskriptif. Menurut Moleong (2012:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam penerapannya, peneliti ini tidak banyak menggunakan angka-angka statistik melainkan hanya menggunakan uraian dalam bentuk kalimat. Alasan menggunakan metode kualitatif adalah analisis data dilakukan tanpa berdasarkan perhitungan presentasi rata-rata dan lain-lainnya dan adanya angka-angka hanya bersifatnya sebagai penunjang, sedangkan penekananya pada proses kerja terdiri dalam kegiatan sehari-hari yaitu fokus analisis yang terpaut langsung dengan masalah kehidupan manusia.

2. Obyek, Subjek dan lokasi penelitian

   a. Obyek penelitian

Obyek penelitian adalah pokok bahasan dari penelitian yang telah diteliti oleh penulis atau peneliti. Obyek penelitian ini yakni :

1. Komunikasi

   Untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. apa yang harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Dalam pelaksanaan kebijakan karena merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi. dalam hal ini, Kecamatan, DPMPTSPP, UPT Pasar, Satpol PP mengkomunikasikan atau mensosialisasikan adanya Peraturan Bupati No.61 Tahun 2013 kepada Pedagang Kaki lima tentang penataan dan pembinaan PKL yang harus ditaati PKL agar tidak terjadi penyimpangan yakni, mengganggu ketertiban umum serta keindahan kota.

2. Sumber-sumber

   Sumber dalam implementasi kebijkaan diteliti untuk mengetahui program kebijakan bisa berjalan efektif dan efisien atau tidak, sumber-sumber yang peneliti teliti ialah sumber daya manusia, apakah memiliki keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan. serta sumber daya anggaran untuk membantu jalannya program Penataan dan Pembinaan PKL.

3. Disposisi

   Sikap atau kecenderungan implementor diteliti untuk

mengetahui bagaimana sikap implementor dalam mendukung implementasi kebijakan tergantung sejauh mana wewenang yang dimiliki, dalam hal ini yang peneliti teliti ialah sikap para implementor dalam melaksanakan kebijakan penataan dan pembinaan PKL.

4. Struktur Birokrasi

Peneliti meneliti struktur birokrasi instansi terkait penataan dan pembinaan PKL untuk mengetahuai kewenangan struktur birokrasi yang melekat pada posisi atau strata kelembagaan dan individu. dalam hal ini maksud peneliti ialah untuk mengetahui SOP *(Standard Operating Procedures)* dengan kata lain Tugas dan fungsi kelembagaan atau individu dalam menjalankan kebijakan Pembinaan dan Penataan PKL.

b. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah. Kepala Bidang Perdagangan dan seksi bagian perdagangan, Kasi Pembangunan Kecamatan, Pedagang Kaki Lima dan Masyarakat. Subyek penelitian ini dapat diperhatikan dalam tabel informan dibawah ini :

Tabel 1.1 Deskripsi Informan berdasarkan status pekerjaan, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan usia

No	Nama	Status Pekerjaan	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan	Usia
1.	Kristian Ajie	Kepala Bidang Perdagangan	Laki-Laki	S1	46
2.	Rudi Evendy Siregar	Seksi Bina Usaha dan Distribusi Perdagangan	Laki-Laki	S1	36
3.	Jaya Adriansyah	Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan	Laki-Laki	SMA	31
4.	Suryat	SATPOL-PP	Laki-Laki	S1	47
5.	Herdian	SATPOL-PP	Laki-Laki	SMA	30
6.	Nurhandika	Kasi Pembangunan Kecamatan	Laki-Laki	S1	28
7.	Emi Hartati	Kasi Pembangunan Kecamatan	Perempuan	S1	45
8.	Aini	PKL	Perempuan	SMA	38
9.	Parida	PKL	Perempuan	SMA	42
10.	Andy	PKL	Laki-Laki	SMA	36
11.	Susanto	PKL	Laki-Laki	SD	41
12.	Rozy	Masyarakat	Laki-Laki	SMA	23
13.	Muhammad Imam	Masyarakat	Laki-Laki	S1	26
14.	Yuni	Masyarakat	Perempuan	SMA	25
15.	Dila	Masyarakat	Perempuan	S1	25
16.	Kasim	Kepala UPT Pasar	Laki-laki	S1	52

Sumber : data Primer 2021

Dalam menentukan informan peneliti menggunakan *purposive sampling technique.* Fenti Hikmawati(2009:68) *Purposive sampling technique* dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata,random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Pengambilan sampe harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu,yang merupakan ciri-ciri populasi.

c. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di kecamatan Manggar, kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah dapat dilakukan dengan berbagai teknik, Namun dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah.

a. Observasi

Observasi adalah suatu tenik atau cara mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi partisipasipasif (*passive participation*), artinya penulis tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2009:227). Meski pun tidak ikut terlibat dalam kegiatan,dengan observasi nonpartisipan data

yang diperolehakan lebih lengkap dan mengetahui pada tingkat mana dari setiap kegiatan subjek.

Pada penelitian ini, observasi nonpartisipan dilakukan dengan cara penulis datang ketempat pedagang kaki lima yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan. Pada prosesnya observasi dilaksanakan sesuai dengan pedoman observasi yang telah dibuat, observasi dilakukan pada dua aspek yaitu aspek fisik dan non fisik. Aspek fisik tersebut meliputi keberadaan lokasi tempat, sarana prasarana dan fasilitas yang digunakan. Sedangkan pada aspek non fisik peneliti mengamati pelayanan yang mengamati suasana dalam pelaksanaan kegiatan

b. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban (narasumber) atas pertanyaan itu. Wawancara. Wawancara yang akan digunakan peneliti adalah wawancara semiter struktur *(Semi structure Interview)* yaitu pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan dan pertanyaan yang diajukan akan berkembang sesuai dengan kebutuhan. Tujuannya untuk memperoleh keterangan,informasi atau penjelasan seputar permasalahan secara mendalam sehingga data yang diperoleh hasilnya akurat dan terpecaya karena diperoleh secara langsung tanpa perantara. Pedoman wawancara yang sebelumnya telah dibuat dimaksudkan

agar wawancara dapat berjalan sesuai dengan harapan dan kebutuhan untuk mendapatkan hasil informasi yang optimal. Wawancara dilakukan dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan sumber-sumber tertulis dari pemerintah daerah dan pedagang kaki lima. Data tersebut dapat berupa dokumen terkait yaitu data informasi Jumlah Pedagang kaki lima, Standar Oprasional Prosedur (SOP), laporan pelaksanaan kegiatan dan sarana prasarana yang menunjang kegiatan penataan PKL serta foto-foto kegiatan yang berhubungan dengan kondisi dilapangan saat melakukan observasi. Dokumentasi digunakan dengan maksud menguatkan fakta atau sebagai bukti dari data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data yang lain.

d. Triangulasi

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Menurut (Sugiyono, 2010: 372) triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Sedangkan triangulasi

teknik adalah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan tehnik yang berbeda (Sugiyono 2010: 330).

Peneliti dalam memperoleh data berdasarkan sumber yang berbeda-beda. Sehingga keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber karena menggunakan teknik yang sama pada sumber yang berbeda-beda. Dalam prosesnya, peneliti akan membandingkan jawaban antar informan di setiap pertanyaan yang sama baik dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan, Kecamtan, Polisi Pamong Praja dan Pedagang Kaki Lima. Selain itu untuk memperkuat hasil penelitiannya, peneliti melakukan observasi lapangan dengan membawa pedoman observasi yang telah dibuat. Peneliti juga membandingkan dengan dokumen yang diperoleh dari hasil lapangan, kegiatan ini dilakukan secara terus menerus hingga hasilnya dapat dipercaya.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. analisis data kualitatif merupakan bentuk penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dan sebagaimana adanya (Nawawi, 174:1993)

Menurut (Mohammad Ali,151:1985) dalam buku Strategi Penelitian Pendidikan menyebutkan ada beberapa langkah dalam proses analisis data kualitatif, yaitu :

1. Penyusunan Data

   Penyusunan data ini dimaksud untuk mempermudah dalam menilai apakah data yang dikumpulkan itu sudah memadai atau belum dan data yang didapat berguna atau tidak dalam penelitian sehingga dilakukan seleksi penyusunan

2. Klasifikasi Data

   Klasifikasi data dimaksudkan sebagai usaha untuk menggolongkan data yang didasarkan pada kategori yang diteliti. Penggolongan ini disesuaikan dengan sub-sub permasalahan yang telah dibuat sebelumnya berdasarkan analisa yang terkandung dalam masalah itu sendiri.

3. Pengelolaan Data

   Setelah semua data dan fakta terkumpul, selanjutnya data tersebut diseleksi, kemudian diolah sehingga sistematis, jelas dan mudah untuk dipahami menggunakan teknik analisis data kualitatif.

4. Penyimpulan Data

   Kegiatan ini dilakukan dengan cara menghubungkan data atau fakta yang satu dengan yang lain sehingga dapat ditarik kesimpulan dan jelas kegunannya. langkah ini dilakukan dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. kesimpulan awal yang dikemukan masih bersifat sementara dan

akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono,252:2009)

Dari keempat metode analisis data diatas maka penulis menyimpulkan bahwa, terealisasinya keempat metode ini setelah semua data-data yang diperlukan dan dibutuhkan sudah diperoleh, kemudian akan difilter mana daya yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini dan mana yang tidak.

BAB II

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

a. Sejarah Kecamatan Manggar

Manggar adalah sebuah Kecamatan sekaligus ibu kota kabupaten Belitung Timur di provinsi Bangka Belitung. Manggar awalnya didirikan sebagai pusat penambangan timah pada abad ke-19. pada dasawarsa 1860-an seorang ahli tambang Belanda dari Billiton Maatschappij yang bernama De Groot menjelajahi wilayah Manggar dan membentuk sebuah distrik penambangan yang disebut Burung Mandi Lenggang. Pada tahun 1963, sebuah tambang timah didirikan di sebalah kanan sungai Manggar, dan nama distriknya pun diganti menjadi Manggar pada tahun 1966.

Pada akhir tahun 1945, ketika revolusi nasional Indonesia berlangsung, aparat belanda menduduki kembali kota ini, walaupun mereka menghadapi perlawanan dari tentara nasional Indonesia. pada dasawarsa 1980-an, Kecamatan Manggar sudah menjadi salah satu dari empat Kecamatan dipulau Belitung. Manggar menjadi ibu kota kabupaten Belitung timur setelah pembentukan kabupaten tersebut pada tahun 2003.

1. Gambaran Geografis

Kecamatan Manggar merupakan salah satu wilayah administrative dan sekaligus ibu kota dari Kabupaten Belitung Timur, provinsi Bangka Belitung. Manggar sendiri awalnya didirikan sebagai pusat penambangan timah pada tahun 1966.

Secara administrasi, Kecamatan Manggar dibagi menjadi 9 desa, yaitu Desa Baru, Desa Bukulimau, Desa Kurnia Jaya, Desa

Mekar Jaya, Desa Lalang Jaya, Desa Bentaian Jaya, Desa Padang, Desa Kelubi dan Desa Lalang. Kecamatan Manggar sendiri terletak dibagian timur kebupaten Belitung timur dan kepulauan Belitung. Secara geografis Kecamatan Manggar terletak 2°53’24” S dan 108°16’12” E dan luas daratan dari wilayah Kecamatan Manggar adalah 229 km^2.

Adapun batas-batas atau luas wilayah Kecamatan Manggar yaitu sebagai berikut: Wilayah administrasi Kecamatan Manggar terdiri dari 9 wilayah desa dengan luas masing masing desa yaitu :

- Desa Kelubi (85,91 km2),
- Desa Padang (96,00 km2),
- Desa Lalang (3,25 km2),
- Desa Lalang Jaya (1,38 km2),
- Desa Kurnia Jaya (2,40 km2)
- Desa Baru (2,70 km2),
- Desa Bentaian Jaya (32,09 km2),
- Desa Mekar Jaya (1,37 km2),
- Desa Buku Limau (3,90 km2)

Gambar 2.1 Peta Kecamatan Manggar

Sumber : Wikipedia

Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Manggar memiliki batas-batas:

• Utara – Kecamatan Kelapa Kampit dan Damar;

• Selatan – Laut Jawa;

• Barat – Kecamatan Simpang Renggiang dan Gantung;

• Timur – Selat Karimata.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Desa Di Kecamatan Manggar

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Persentase
1.	Kelubi	85,91	37,52
2.	Padang	96,00	41,92
3.	Lalang	3,25	1,42
4.	Lalang Jaya	1,38	0,60
5.	Mekar Jaya	1,37	0,06
6.	Bentaian Jaya	32,09	14,01

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Persentase
7.	Kurnia Jaya	2,40	1,05
8.	Baru	2,70	1,18
9.	Bukulimau	3,90	1,70
Total		229,00	100

Sumber : Kantor Camat Manggar Tahun 2018

Dari tabel 2.1 diatas menjelaskan bahwa Desa Kelubi dan Desa Padang merupakan desa yang memiliki wilayah yang cukup luas dibandingkan dengan desa lainnya yaitu hampir menguasai 75% dari luas wilayah Kexamatan Manggar. Sedangkan Desa Lalang Jaya dan Desa Mekar Jaya merupakan desa dengan luas wilayah paling kecil dianatara desa lainnya yaitu kurang dari 1% wilayah Kecamatan Manggar.

2. Gambaran Demografis

Jumlah penduduk Kecamatan Manggar berdasarkan database kemendagri semester II 2018 adalah sebanyak 38.943 jiwa, terdiri dari 19.914 penduduk laki-laki dan 19.029 penduduk wanita. Berdasarkan jumlah penduduk yang ada menunjukan bawha jumlah penduduk laki-laki dan perempuan tidak jauh perbandingannya walaupun jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan. Desa Baru merupakan desa dengan jumlah penduduk terbanyak dan desa dengan tingkat kepadatan paling tinggi dari 9 desa yang terdapat di Kecamatan Manggar.

a. Jumlah Penduduk Menurut Agama Dan Desa

Pada umumnya hampir disetiap wilayah memiliki keberagaman yang kerap kali kita jumpai dan kita rasakan, dengan jumlah penduduk yang begitu banyak di kecamtan Manggar juga menyimpan berbagai keberagaman kepercayaan masing-masing mayrakat yang tentu saja berbeda-beda. Dengan menganut kepercayaan yang berbeda dapat kita lihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2 Data Penduduk Menurut Agama Kecamatan Manggar

No	Desa	Agama					
		Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Konghucu
1.	Lalang Jaya	3.436	49	6	0	52	0
2.	Kurnia Jaya	5.046	156	33	0	263	11
3.	Padang	6.568	213	20	0	293	18
4.	Kelubi	2.683	5	2	0	0	0
5.	Lalang	4.811	58	17	0	18	0
6.	Baru	8.602	231	90	1	705	74
7.	Bukulimau	830	0	0	0	0	0
8.	Mekar Jaya	2.885	93	20	0	161	4
9.	Bentaian Jaya	1.479	3	0	0	0	0
Total		36.340	808	188	1	1.494	107

Sumber : Database Kemendagri Semester II Tahun 2018

Dari tabel 2.2 diatas mayoritas penduduk Kecamatan Manggar beragama Islam dengan jumlah sebanyak 36.340 jiwa, sedangkan agama Kristen sebanyak 808 jiwa, agama Katholik sebanyak 188 jiwa, agama Hindu sebanyak 1 jiwa, agama Budha sebanyak 1.494 jiwa dan Konghucu sebanyak 107 jiwa. Dari tabel diatas tampak desa baru mempunyai kebergaman agama yang ada dan memiliki jumlah terbanyak dari setiap agama yang ada.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Desa

Dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan desa dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3 Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Desa	Jumlah Penduduk			
		Laki-Laki	Perempuan	Total	Persentase
1.	Lalang Jaya	1.817	1.726	3.543	9,08
2.	Kurnia Jaya	2.823	2.686	5.509	14,13
3.	Padang	3.620	3.492	7.112	18,29
4.	Kelubi	1.402	1.288	2.690	6,9
5.	Lalang	2.537	2.367	4.904	12,67
6.	Baru	4.966	4.742	9.708	24,9
7.	Bukulimau	424	406	830	2,12
8.	Mekar Jaya	1.566	1.597	3.163	8,11
9.	Bentaian Jaya	759	725	1.484	3,8
Total		19.914	19.029	38.983	100

Sumber : Database Kemendagri Semester II Tahun 2018

Dari tabel 2.3 data penduduk menurut jenis kelamin di atas penduduk Kecamatan Manggar hampir seimbang atar penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Dari tabel diatas penduduk desa baru lebih banyak antara desa lainnya yakni berjumlah 24% sedangkan penduduk desa bentaian jaya lebih sedikit antara desa lainnya yang jumlah penduduknya sekitar 1.484 jiwa.

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Produkif

dilihat dari umur penduduk Kecamatan Manggar ini dapat dilihat dalam gambagr tabel berikut ini:

Tabel 2.4 Data Penduduk Usia Produktif

No	Desa	0-14	15-64	>65	Total
1.	Lalang Jaya	900	2.428	215	3.543
2.	Kurnia Jaya	1.435	3.776	298	5.509
3.	Padang	1.907	4.751	454	7.112
4.	Kelubi	626	1.882	182	2.690
5.	Lalang	1.139	3.307	458	4.904
6.	Baru	2.531	6.590	587	9.709
7.	Bukulimau	230	539	61	830
8.	Mekar Jaya	795	2.111	257	3.163
9.	Bentaian Jaya	340	1.059	85	1.484
Jumlah		9.903	26.443	2.597	38.943

Sumber : Database Kemendagri Semester II Tahun 2018

Pada tabel 2.4 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk terbesar anatara 15 tahun sampai dengan 64 tahun

yakni sebesar 26.443 jiwa dan, artinya sebagaian besar masyarakat Kecamatan Manggar termasuk usia produktif dan desa baru merupakan desa yang terbesar usia masyarakat produktifnya dengan jumlah 6.590 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil yaitu berusia >65 tahun, dari data diatas sudah dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk yang berusia >65 tahun masih tergolong cukup sedang, akan tetapi anak-anak yang berusia 0-14 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan usia >65 tahun.

d. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan salah satu bagian terpenting untuk mengukur atau menegetahui gambaran sosial masyarakat disuatu wilayah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia yang ada diwilayah tersebut. Maka dari itu, suatu wilayah membutuhkan sarana dan prasarana pendidikan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan pendidikan yang layak sekaligus dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Tabel 2.5 Data Penduduk Menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Total	Persentase
1.	Belum Sekolah	7.132	18,4
2.	Belum Tamat SD	6.695	17,1
3.	Tamat SD/Sederajat	9.882	25,4
4.	SMP/Sederajat	4.914	12,6
5.	SMA/Sederajat	7.773	20
6.	Diploma I/II/III	1.096	2,8
7.	Diploma IV/S1/SII/SIII	1.464	3,7
Jumlah		38.956	100

Sumber : Kantor Kecamatan Manggar Tahun 2018

Pada tabel 2.5 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Manggar mayoritas banyak didominasi oleh masyarakat yang kurang berpendidikan hal ini bisa diliahat dari tabel diatas jumlah masyarakat yang hanya sampai tamat SD/sederajat sampai dibawahnya kurang lebih 60% jumlah masyarakat yang ada di Kecamatan Manggar.

e. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

Dengan merunjuk pada masing-masing kebiasaan hingga perbedaan lingkungan, budaya, agama, pendidikan dan kebutuhan lainnya, setiap daerah pada umumnya mempunyai kegiatan/aktifitas dan pekerjaan yang berbeda-beda. Terkait

dengan ini, diKecamatan Manggar ditemui beberapa mata pencarian masyarakat seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.6 Data Penduduk Mata Pencarian

No	Mata Pencarian	Jumlah	Persentase
1.	Pertanian/Perternakan	253	0,9
2.	Nelayan	1.840	6,5
3.	Perdagangan	237	0,8
4.	PNS/TNI/Polri	1.416	5
5.	Karyawan Swasta	1.051	3,8
6.	Honorer	689	2,5
7.	Guru/Dosen	135	0,4
8.	Buruh Harian	5.231	18,7
9.	Pelajar	7.644	27,3
10.	Menggurus Rumah Tangga	9.510	34
11.	Lainnya	20	0,1
Jumlah		28.026	100

Sumber : Kantor Kecamatan Manggar Tahun 2018

Berdasarkan pada tabel 2.6 diatas, dapat dikatakan bahwa terdapat erbagai jenis mata pencarian atau lebih dari 11 mata pencarian yang beragam di Kecamatan Manggar. Tentu dari masing-masing mata pencarian diatas juga mempunyai tingkat pencampaian hasil yang berbeda-beda, terlepas dari itu hasil dari semua pendapatan masyarakat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwasannya

mayoritas pekerjaan masyarakat Kecamatan Manggar adalah bukan aparatur sipil negara melaikan banyaknya pencarian harian. setiap tahun dengan pertumbuhan jumlaha manusia yang begitu pesat menyebabkan kurangnya lapangan pekerjaan. Akhirnya banyak masayarakat

3. Gambaran Sarana Dan Prasarana

1. Pendidikan

Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan salah satu bagian terpenting untuk mengukur atau mengetahui gambaran sosial dimasyarakat di suatu wilayah. Hal ini bertujuan untuk meningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada diwilayah tersebut. maka dari itu suatu wilayah membutuhkan saraba dan prasarana pendidikan untuk untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan pendidikan yang layak sekaligus dapat meningkatkan taraf hidup masyrakat.

Tabel 2.7 Prasarana Pendidikan

No	Jenis Prasarana Pendidikan	Jumlah
1.	Kelompok Bermain	16
2.	Taman Pendidikan Al-Quran (TPA)	20
3.	Taman Kanak-Kanak (TK)	25
4.	Sekolah Dasar	30
5.	Sekolah Menengah Pertama/MTS	6
6.	Sekolah Menengah Atas/SMK/MA	6

Sumber : Kantor Kecamatan Manggar Tahun 2018

Pada tabel 2.7 diatas prasarana pendidikan di Kecamatan Manggar, maka dapat diperhatikan bahwa prasarana yang sudah cukup memadai, karena dari prasarana pendidikan anak usia dini(PAUD) atau kelompok bermain sampai dengan institusi/ sekolah menengah dan sekolah menengah keterampilan yang sudah tersedia.

2. Ibadah

Kemerdekanan masing-masing masyarakat, salah satunya ditandai dengan kebebasan dalam memeluk dan menjalankan keyakinan serta perintah agama mereka sendiri. Oleh sebab itu untuk bisa menjalankan ibadah dengan berdasarkan hak masyrakat, maka harus tersedia prasarana ibadah di Kecamatan Manggar sebagai berikut :

Tabel 2.8 Prasarana Ibadah

No	Prasarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	23
2.	Surau	24
3.	Gereja	3
4.	Pura	1
5.	Vihara	2
6.	Kelenteng	5

Sumber : Kantor Kecamatan Manggar Tahun 2018

Di Kecamatan Manggar dapat dikatakan cukup lengkap ketersediaan sarana ibadah yang cukup memadai bagi keseluaran

masyarakat beragama. Walaupun mayoritas penduduk Kecamatan Manggar beragama islam, tidak mengurangi pemerintah maupun masyarakat dalam metolerin agama yang ada.

3. Kesehatan

Dalam menunjang kegiatan masyarakat, maka sarana dan prasarana kesehatan menjadi salah satu hal yang cukup penting bagi suatu daerah. dengan kondisi geografis dan demografis desa yang tergolong padat dan mudah dijangkau,maka sarana kesehatan di Kecamatan Manggar terbilang lengkap atau dapat diperhatikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.9 Prasarana Kesehatan

No	Prasarana Kesehatan	Jumlah
1.	Rumah Sakit	1
2.	Puskesmas	3
3.	Poliklinik	8
4.	Polindes/Poskesdes	20
5.	Toko Obat/ Apotik	16

Sumber : Kantor Kecamatan Manggar Tahun 2018

Tabel 2.9 diatas, menjelaskan bahwa Kecamatan Manggar memiliki ketersediaan sarana prasarana kesehatan tang tergolong cukup memadai. Keadaan ini dapat menunjukan bahwa kesehatan menjadi aspek yang sangat penting bagi masyarakat Kecamatan Manggar. Dengan tersedianya segala prasarana kesehatan diatas,

tentunya meminimalisir terjadinya gizi buruk dan angka kematian dalam lingkup Kecamatan maupun daerah.

4. Prasarana Umum

Sehat jasmani dan rohani merupakan bentuk masyarakat yang sejahtera dan sangat perlu dilingkungan masyarakat itu sendiri, untuk melihat sarana dan prasarana umum seperti sarana olahraga dan sosial lainnya diKecamatan Manggar dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.10 Prasarana Umum

No	Prasarana Umum	Jumlah
1.	Olahraga	50
2.	Kesenian/Budaya	9
3.	Pasar	3
4.	Balai Pertemuan	6
5.	Lainnya	18

Sumber : Kantor Kecamat Manggar Tahun 2018

Terciptanya kehidupan masyarakat desa yang sehat, rukun dan harmonis tidak cukup jika tidak memperhatikan fasilitas atau prasarana umum seperti yang terdapat dalam tabel diatas yaitu seperti prasarana olahraga yang memadai membantu masyrakat untuk berintreaksi dan hidup sehat dengan melakukan aktifitas olaraga. Tersediannya prasarana kesenian dan budaya dapat menjadi panggung masyrakat dalam menyalurkan bakat dan jiwa seninya. Demikian juga dengan prasarana lainnya seperti balai

pertemuan masyrakat yang dapat mempermudah masyarakat dalam menyelengarakan acara yang bersifat mengumpulkan masyarakat yang banyak.

Data-data diatas saya peroleh dari Buku Kecamatan Manggar Dalam Angka merupakan publikasi tahunan BPS Kabupaten Belitung Timur tahun 2018. Publikasi ini menyajikan informasi statistik mengenai perkembangan pembangunan Kecamatan Manggar tahun 2018 baik di bidang sosial maupun di bidang ekonomi. Di bidang sosial dapat diperoleh gambaran tentang perkembangan penduduk, kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan, selain itu hotel dan pariwisata, pertanian dan industri. Saya menggunakan data tersebut karena tidak adanya data terbaru tahun 2020 karena belum ada publikasi terbaru menegenai informasi statistik Kabupaten Belitung Timur.

4. Susunan Organisasi
   a. Struktur Organisasi

Sumber : Kantor Kecamatan Manggar 2021

STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN MANGGAR

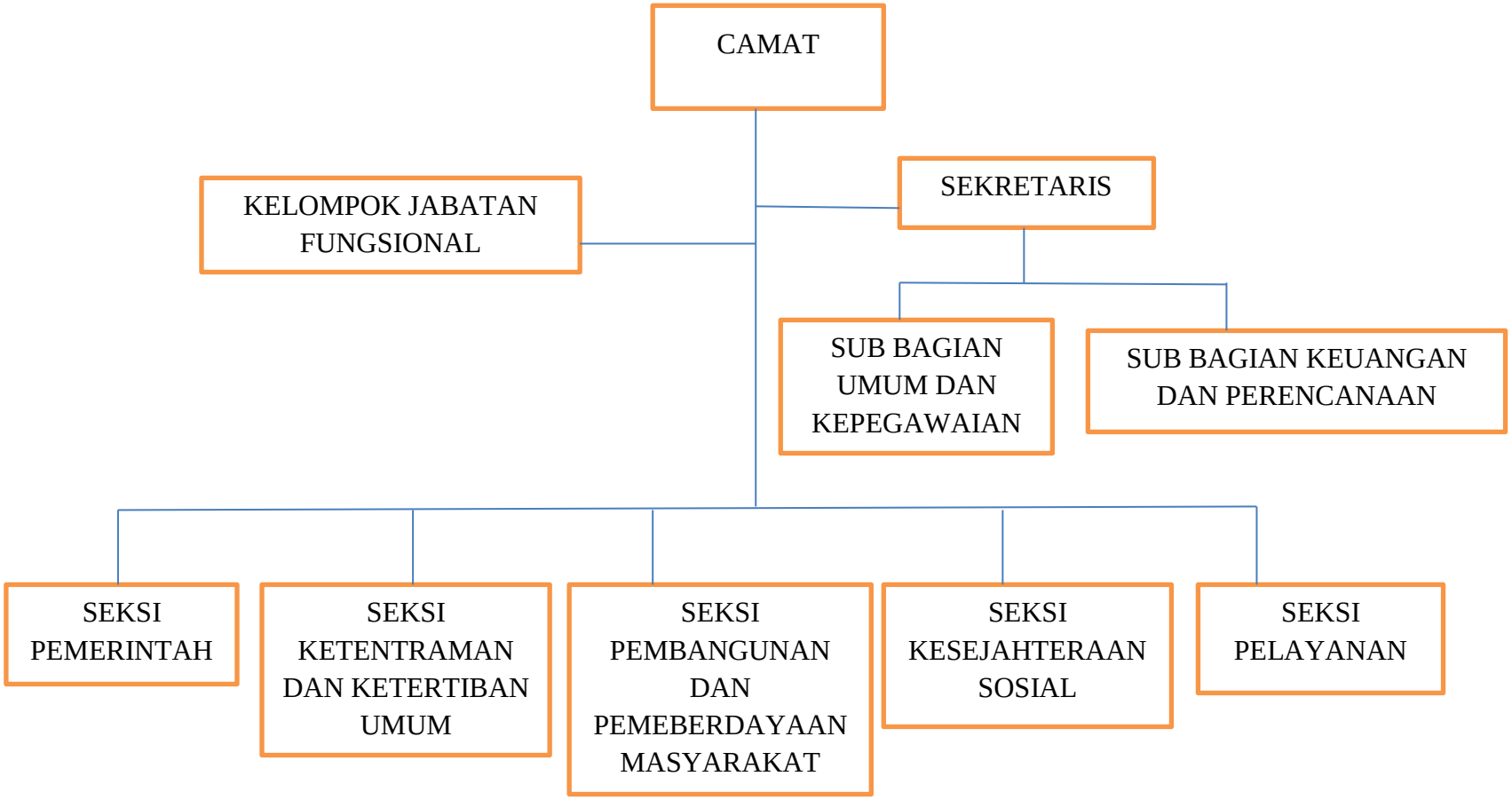

SRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN

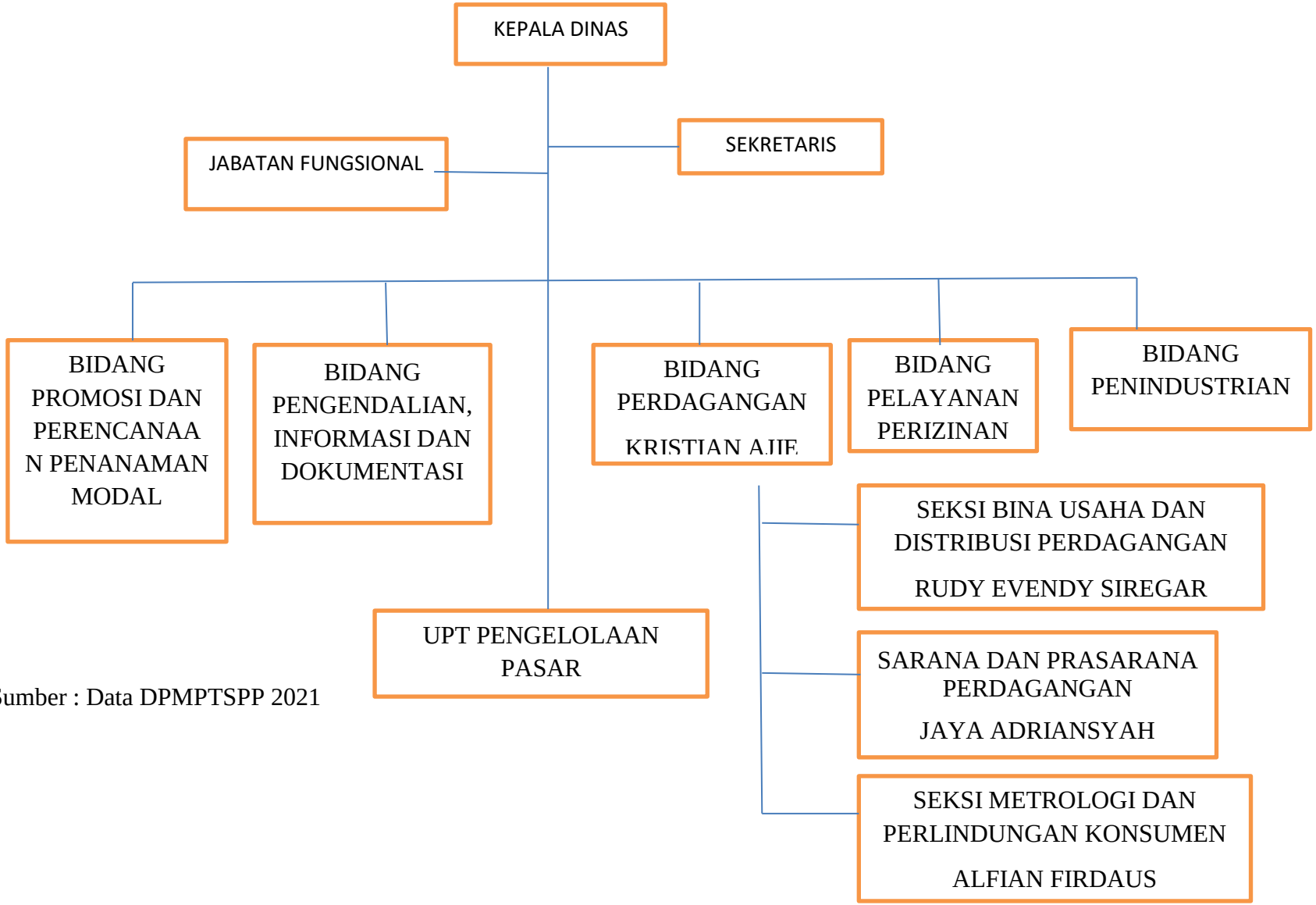

Sumber : Data DPMPTSPP 2021

5. Data Pedagang Kecamatan Manggar

Tabel 2.11 Data Pedagang Kecamatan Manggar

No.	Desa/ Asal PKL	Data Pedagang Kecamatan Manggar			
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1.	Desa Baru	51	34	86	41,5
2.	Desa Padang	9	7	16	8
3.	Desa Kurnia Jaya	37	17	54	25,5
4.	Desa Lalang Jaya	5	3	8	4
5.	Desa Kelubi	0	0	0	0
6.	Desa Lalang	7	5	12	6
7.	Desa Mekar Jaya	2	8	10	5
8.	Desa Bentaian Jaya	0	0	0	0
9.	Desa Bukulimau	0	0	0	0
10.	Luar Pulau Belitung	4	2	6	3
11.	Tanjung Padan	5	2	7	3,5
12.	Kecamatan Kampit	0	1	1	0,5
13.	Kecamatan Damar	2	0	2	1
14.	Kecamatan Gantung	2	0	2	1
15.	Kecamatan Simpang Pesak	1	1	2	1
Total		125	80	205	100

Sumber : Data Primer Dinas Perdagangan 2020

tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah pedagang yang ada mayoritasnya adalah masyarakat Kecamatan Manggar. Desa Baru dan Desa Kurnia Jaya merupakan jumlah pedangang terbanyak di Kecamatan Manggar dengar persentase 66% dengan Desa Baru merupakan jumlah pedagang terbanyak. Sedangkan jumlah pedagang terendah adalah Desa Bentaian Jaya, Desa Kelubi dan Desa Bukulimau dengan jumlah persentase hanya 0%. Jumlah pedagang diluar Kecamatan Manggar ataupun diluar dari Pulau Belitung hanya berjumlah 20 pedagang atau 9,5% dari jumlah seluruh pedagang di Kecamatan Manggar.

Dari data pedagang diatas, data yang saya ambil merupakan data yang saya dapat dari DPMPTSTPP di bidang perdagangan dimana data ini baru saja dibuat pada tahun 2020 akhir. Data ini merupakan data gabungan pedagang yang menerima BLTD dan merupakan data pedagang yang terdaftar di DPMPTSPP.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijkan Public*. Bandung. Cv. Alfabeta

Dunn William N. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik,* cetakan kelima. Yogyakarta. Gajah Mada Univesitas Press

Edward III,Geoege C. 2003. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press

Hadari Namawi.1993. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Jakarta. Gaja Mada University Press

Harahap, Sofyan Syahri. 2004. *Manajemen Resiko, Konsep, Kasus Dan Implementasi*. Yogyakarta. Elex Media Komputindo

Hikmawati Fenti. 2009. *Metodelogi Penelitian*. Depok. Rajawali Pers

Isgunandar.2013. *Skripsi Analisis Kebijakan Pendelegasian Kewenangana Walikota Kepada Camat Dikota Makasar*, Ilmu Pemerintahan.Makasar. Universitas Hasannudin

Maleong,Lexy J.2007.*Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Mosda Karya

Mangunhardjana.1986. *Pembinaan Arti Dan Metodenya*. Yogyakrata. Kanesius

Masmanian, Daniel H, Paul A.Sabatier.1983. *Implementation And Public Policy*. Newyork. Harpercollins

Mohammad Ali.1985.*Strategi Penelitian Pendidikan*. Bandung. Angkasa

Nugroho Dwijowijoto, Riant. 2006. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*.Jakarta. PT. Elex Media Komputindo

Parson, Wayne.2005. *Publik Police(Pengantar Teori Dan Analisis Kebijkan*. Jakarta. Kencana

Pasalong, Harbani. 2011. *Cetakan Kedua, Kepemimpinan Birokrasi*,Bandung Cv. Alhfabeta

Subarsono, Ag. 2010. *Analisis Kebijakan Publik.*Yogyakarta. Pustaka Pelajar

Sugiyono.2009.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.Bandung. Alfabeda

Syamsu Alam, Andidan Ali, Fareid. 2011. *Studi Kebijakan Pemerintah*.Yogyakarta. Refika Aditama

Tangkilisan, Hesel Nogi S. Saputro, Hadi S.2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Jakarta. Lukman Offset

Usman Dan Nurdin .2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada

Wahab, Solichin Abdul.2005, *Analisis Kebijaksanaan Dan Formulasi Keimplementasi, Kebijaksanaan Negara*.Jakarta. Bumi Aksara

Widodo Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*.Malang. Banyu Media Publishing

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik(Teori, Proses Dan Studi Kasus)*. Yogyakarta. Center Of Academic Publishinh Service